

PENGARUH PENERIMAAN PAJAK REKLAME DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN PURWOREJO

**Tri Lestari
Firman Bachtiar**

Program Studi Akuntansi
Politeknik Sawunggalih Aji
Jl. Wismoaji no. 8 Kutoarjo, Purworejo
Email : lestari8491@gmail.com

ABSTRACT

Advertisement tax and regional retribution is an important contribution in supporting the increase of PAD. Regional Original Income is a very important contribution in supporting the regional economy because it acts as a source of funding and as a benchmark in the implementation of regional autonomy. With the implementation of regional autonomy it provides an opportunity for the government to explore the results of regional wealth sourced from the PAD. If PAD has increased every year, development in the regions will be carried out well.

This study aims to determine the effect of advertising tax and regional retribution partially on PAD and to find out which variables are more dominant than the two variables that affect the increase in PAD in Purworejo Regency. The data used are realization reports from BPPKAD Purworejo Regency in 2016 to 2018, using multiple regression analysis and data processing using SPSS version 20.0.

Based on the results of data processing, it can be seen that the regression model has no deviation in the classical assumption test. Advertising tax partially has no effect on the increase in PAD and regional retribution has an effect on PAD with a significant value of 0.007. Whereas seen from the contribution of regional retribution more dominantly influences the increase in Regional Original Revenue that is equal to 52.4%, while for advertisement tax contribution is only -18.2%.

Keywords: advertising tax, regional retribution, local revenue.

1. Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Dengan adanya otonomi di Indonesia, menuntut setiap daerah atau kota mampu merencanakan sumber-sumber pendapatan tiap daerah. Secara ekonomi, otonomi diharapkan akan menciptakan stabilitas ekonomi dan tercapainya efisiensi kinerja perekonomian dengan asumsi bahwa pembangunan di daerah akan lebih cepat dan ekonomis bila dikerjakan oleh sumberdaya manusia dari daerah itu sendiri. Diberlakukannya otonomi daerah memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki secara efektif dan efisien.

Otonomi daerah merupakan suatu konsekuensi yang harus dihadapi oleh seluruh daerah di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan pembelajaran di setiap daerah untuk dapat mengubah tantangan menjadi sebuah peluang bagi kemajuan daerahnya. Disisi lain, pemerintah sebagai pengatur pengembangan konsep otonomi daerah, berperan sebagai penanggung jawab agar konsep otonomi daerah dapat dilaksanakan seperti yang diharapkan.

Pemerintah dalam rangka penanggung jawab konsep otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, potensi dan

keanekaragaman daerah. Dengan memperhatikan aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil, selain itu juga memperhatikan aspek ilmu pengetahuan dan teknologi pada setiap daerah. Agar mampu menjalankan peranan tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluasnya.

Adanya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2012 tentang desa yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menyelenggarakan kewenangannya, memerlukan sumber-sumber pendapatan untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan tersebut. Untuk mengelola sendiri kegiatannya meliputi penyaluran, pengelolaan, dan pertanggungjawaban.

Otonomi daerah membuat daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur urusan rumah tangganya. Hal ini menuntut Pemerintah Daerah untuk lebih bijak dalam hal pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu Pemerintah Daerah dituntut untuk

dapat mengalokasikan hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan merata.

Sehingga untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah harus dapat mengidentifikasi sektor-sektor yang dinilai potensial sebagai pendorong pembangunan daerah, terutama melalui upaya peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dimana kemampuan daerah dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan melalui peran serta masyarakat dalam pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah.

Pemerintah daerah dapat terselenggara karena adanya dukungan berbagai faktor sumber daya yang mampu menggerakkan jalannya roda organisasi pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan. Faktor keuangan merupakan faktor utama yang merupakan sumber daya finansial bagi pembiayaan penyelenggaraan roda pemerintah daerah.

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan daerah yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Anggaran daerah disebut juga Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah (APBD). Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, kepala daerah diberi kesempatan untuk menggali potensi-

potensi sumber keuangan di daerahnya sekaligus dapat mengalokasikan sumber daya ke pendapatan asli daerah di daerahnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sangat penting karena berperan sebagai sumber pembiayaan dan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Kunci kemandirian daerah adalah pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi daerah itu sendiri sehingga dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Sedangkan kemampuan keuangan daerah diukur dari besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap anggaran pendapatan daerah, dimana dengan cara mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada.

Pajak daerah yang ada di Kabupaten Purworejo dikelola oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan,

pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan mineral bukan logam, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan, serta pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dari semua pajak yang menjadi kontribusi dalam pajak daerah, pemerintah Kabupaten Purworejo berusaha mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pajak reklame. Karena apabila dilihat dari kontribusinya bagi pajak daerah, pajak reklame sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah yang berpotensi, dan dapat dilakukan pemungutan secara efisien, efektif, dan ekonomis sehingga dapat lebih berperan dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Purworejo.

Selain pajak reklame, retribusi daerah juga penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Perda Kabupaten Purworejo No. 2 Tahun 2012, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah dapat digolongkan menjadi tiga golongan yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Kedua jenis pendapatan tersebut merupakan pendapatan daerah yang digunakan pemerintah daerah

untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pemerintah daerah diharapkan lebih mengerti dan dapat memenuhi aspirasi masyarakat, selain itu pemerintah daerah diharapkan dapat lebih memanfaatkan pendapatan daerah yang diterima sehingga dapat membiayai pengeluarannya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan sebelumnya dan karena luasnya pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis akan membatasi pokok masalah dalam penelitian ini yaitu, **“Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Purworejo”**.

Rumusan Masalah

1. Apakah penerimaan pajak reklame berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Purworejo?
2. Apakah penerimaan retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Purworejo?
3. Apakah penerimaan pajak reklame lebih dominan kontribusinya dari penerimaan retribusi daerah dalam mempengaruhi peningkatan

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Purworejo?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Untuk mengetahui pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3. Untuk mengetahui yang lebih dominan antara Pajak Reklame dan Retribusi dalam mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Metodologi Penelitian

Dalam metode penelitian ini peneliti menguraikan metodologi penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan masalah penelitian, antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Data
Data kuantitatif biasanya disimpulkan dengan angka-angka, data seperti ini biasanya hasil transformasi dari data kualitatif yang memiliki perbedaan berjenjang. (Burhan, 2015:124). Data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pajak Reklame, Retribusi Daerah, dan PAD.
2. Sumber Data

Data Sekunder (Burhan, 2015) yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder, dengan mempelajari buku-buku, literature, makalah, peraturan. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah laporan realisasi anggaran dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Purworejo.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas, obyek/subyek yang mempengaruhi kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya

(Sugiyono,2011:119). Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran yang sudah ada di BPPKAD Kabupaten Purworejo.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono,2011:120). Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pajak Reklame dan Retribusi Daerah tahun 2016-2018.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam penulisan ini penulis menggunakan teknik wawancara dengan pegawai Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) khususnya di bidang selain pajak PBB dan bidang Pendapatan Transfer Dan Lain-lain Pendaptan Daerah.

b. Dokumen

Dalam hal ini dokumen yang digunakan catatan, arsip-arsip, surat-surat, peraturan daerah, maupun laporan-laporan kegiatan yang diperoleh dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Purworejo.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisa menggunakan analisis linier berganda. Analisa linier berganda merupakan teknik analisis regresi yang digunakan untuk menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Persamaan regresi dinyatakan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Asli Daerah

α = Konstanta atau *Intercept*

X₁ = Pajak Reklame

X₂ = Retribusi Daerah

ε = *Error*

6. Lokasi, Objek dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan maka peneliti mengadakan penelitian pada Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Purworejo yang beralamat di Jl. Proklamasi No 2 Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

b. Objek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran yang sudah disusun di BPPKAD Purworejo.

c. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan Februari sampai dengan Maret

2. Kajian Teori

Pajak Reklame

Menurut Peraturan Bupati Purworejo Nomor 71 Tahun 2014, Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggara reklame. Sedangkan, reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau

untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi berdasarkan pula atas peraturan-peraturan yang berlaku umum dan untuk mentaatinya yang berkepentingan dapat pula dipaksakan, yaitu barang siapa yang ingin mendapat suatu prestasi tertentu dari pemerintah harus membayar. (Darwin:2010)

Pendapatan Asli Daerah

Penegertian Pendapatan Asli Daerah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang isinya, Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kajian teori dan tujuan penelitian, maka hipotesis dapat dirumuskan:

H_1 : Pajak Reklame berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

H_2 : Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. Pembahasan

Setelah data diperoleh, diperlukan adanya pengujian atas data tersebut agar dapat dianalisis lebih lanjut dan dapat digunakan dalam hipotesis. Adapun uji yang dilakukan meliputi uji asumsi klasik (multikolinieritas, normalitas, autokorelasi, heteroskedasitas) dan uji hipotesis yang mencakup analisis regresi dan uji determinasi.

Statistik Deskriptif

Adapun statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi secara statistik terhadap variabel yang terdiri dari pajak reklame, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah. Hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 4.2

Tabel 4.2
Hasil Analisa Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Reklame	36	18861854	115269621	52014942.67	19314514.924
Retribusi Daerah	36	678029807	1475374005	979484883.72	180835642.010
PAD	36	21299915868	24883874554	23366016857.00	1535101968.765
Valid N (listwise)	36				

Sumber: Output SPSS 20.0, data sekunder diolah 2020

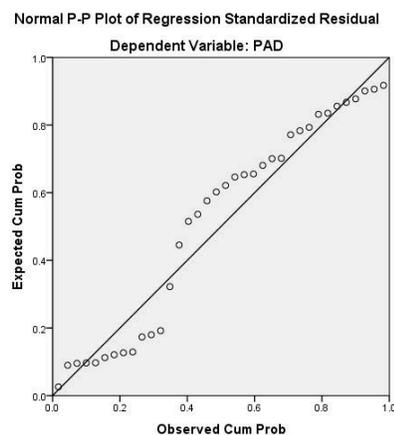
Pada tabel 4.2 diatas, dapat dilihat bahwa variabel Pajak Reklame memiliki nilai terendah sebesar Rp 18.861.854 dan nilai tertinggi sebesar Rp 115.269.621 dengan nilai rata-rata sebesar Rp 52.014.942 dan standar deviasi sebesar Rp 19.314.514.

Variabel Retribusi Daerah untuk nilai terendah sebesar Rp 678.029.807 dan nilai tertinggi sebesar Rp 1.475.374.005 dengan rata-rata Rp 979.484.883 dan standar deviasi sebesar Rp 180.835.642.

Variabel Pendapatan Asli Daerah menunjukkan untuk nilai tertinggi sebesar Rp 21.299.915.868 dan nilai tertinggi sebesar Rp 24.883.874.554 dengan rata-rata Rp 23.366.016.857 dan standar deviasi Rp 1.535.101.968.

Uji Normalitas

Menurut Hengky dan Selva (2013;56) pengujian terhadap asumsi klasik normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual data dari model regresi linier memiliki distribusi normal ataukah tidak. Uji normalitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji metode grafik P-Plot dan One-Sample Kolmogorov-Smirnov.



Gambar 4.1

Hasil Uji Normal P-Plot

Sumber: Output SPSS 20.0, data sekunder diolah 2020

Berdasarkan gambar 4.1 diatas, dapat disimpulkan bahwa P-Plot menunjukkan pola distribusi normal. Pada gambar diatas juga dapat dilihat bahwa titik-titik yang terbentuk menyebar disekitar garis diagonal.

Tabel 4.3
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Mean		.0000021
Normal Parameters ^{a,b}	Std.	1468125090
	Deviation	.95536700
Most Extreme Differences	Absolute	.148
	Positive	.148
	Negative	-.134
Kolmogorov-Smirnov Z		.891
Asymp. Sig. (2-tailed)		.406

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Output SPSS 20.0, data sekunder diolah 2020

Dari hasil *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* diatas diperoleh nilai *Asymp. Sig.* Sebesar 0,406. Karena nilai 0,406 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi normal.

Uji Multikolonieritas

Hasil uji multikolonieritas dengan menggunakan perhitungan nilai Tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor) sebagaimana tersaji dalam tabel 4.4

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat disimpulkan bahwa dari model, tidak mengalami gejala multikolonieritas karena memiliki tolerance yang lebih besar dari 0,01 dan VIF yang lebih kecil dari 10.

Tabel 4.4
Hasi Uji Multikolonieritas

Coefficients^a

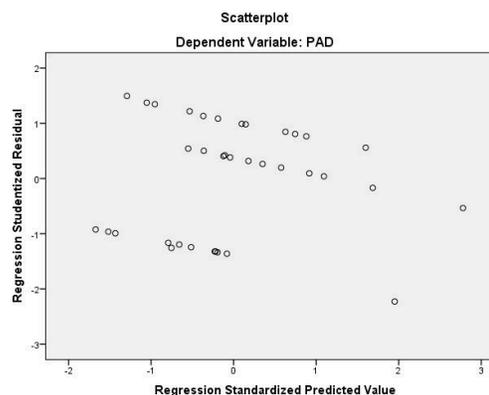
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 Pajak	.916	1.091
Reklame		
Retribusi Daerah	.916	1.091

a. Dependent Variabel: PAD

Sumber: Output SPSS 20.0, data sekunder diolah 2020

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heterokedasitas dilakukan dengan membuat Scatterplot (alur sebaran) antara residual dan nilai prediksi dari variabel terikat yang telah distandarisasi. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar 4.2 dibawah ini:



Gambar 4.2

Uji Heterokedasitas dengan Uji Scatterplot

Sumber: Output SPSS 20.0, data sekunder diolah 2020

Dari gambar diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak berkumpul dalam satu tempat. Hal ini dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas. Asumsi klasik

tentang heterokedasitas dalam model ini terpenuhi, yaitu terbatas dari heteroskedastisitas.

Tabel 4.5
Uji Heterokedasitas Glejser
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2815087575,865	612471191,143		4,596	,000
1 Pajak Reklame	-9,533	5,884	-,265	-1,620	,115
Retribusi Daerah	-1,066	,628	-,278	-1,696	,099

a. Dependent Variable: glejser

Sumber: Output SPSS 20.0, data sekunder diolah 2020

Dari hasil uji glejser diatas diperoleh nilai signifikansi untuk variabel > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut memenuhi asumsi klasik heteroskedastisitas. Hasil glejser ini

konsisten dengan hasil uji scatterplot sebelumnya.

Uji Autokorelasi

Dapat dilihat pada tabel 4.6 hasil uji autokorelasi sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,178 ^a	,032	-,029	646013631,219 63	1,547

a. Predictors: (Constant), LAG_X2, LAG_X1

b. Dependent Variable: LAG_Y

Sumber: Output SPSS 20.0, data sekunder diolah 2020

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa nilai *Durbin-Watson* yang diperoleh sebesar 1,547. Pengambilan keputusan pada asumsi ini memerlukan dua nilai bantu yang diperoleh dari tabel *Durbin-Watson*, yaitu d_l dan d_u . Pada tabel *Durbin-Watson* dengan $n=36$, $K=3$ maka akan

diperoleh $d_l = 1,353$ dan $d_u = 1,587$. Karena nilai *Durbin-Watson* (1,547) tidak lebih besar dari d_u melainkan lebih besar dari d_l , maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi tersebut tidak ada autokorelasi positif.

Koefisien determinasi (*R-Squares*)

Hasil pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ditemukan

nilai adjusted R Square sebagaimana tersaji dalam tabel 4.7

Tabel 4.7
Hasil Koefisien Determinasi (*R-Squares*)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.484 ^a	.234	.179	1256398625.152

a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Reklame

b. Dependent Variable: PAD

Sumber: Output SPSS 20.0, data sekunder diolah 2020

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (*R-Squares*) adalah 0,234, menunjukkan bahwa model lemah, dan berarti bahwa variabel Pajak Reklame dan Retribusi Daerah memberikan kontribusi sebesar 23,4% terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Purworejo sementara 76,6% dari Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Purworejo dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

Uji signifikansi F (Uji F)

Uji Statistik F Yang dilakukan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05, hasil ujinya sebagaimana tersaji dalam tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji Signifikansi F
ANOVA^a

Model	F	Sig.
1 Regression	4.274	.024 ^b
Residual		
Total		

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Reklame

Sumber: Output SPSS 20.0, data sekunder diolah 2020

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa nilai F sebesar 4,274 sementara nilai F tabel sebesar 3,34. Hasil regresi berganda juga menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,024 lebih kecil dari pada (α) 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

Uji signifikansi t (Uji t)

Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 4.9:

Tabel 4.9
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	
	B	Std. Error				
1	20490975791.617	1250631716.904		16.385	.000	
	(Constant)					
	Pajak Reklame	-12.415	12.251	-.182	-1.013	.320
	Retribusi Daerah	3.983	1.364	.524	2.921	.007

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Output SPSS 20.0, data sekunder diolah 2020

Berdasarkan tabel 4.9, diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 20490975791.617 - 12,415X_1 + 3,983X_2 + \varepsilon$$

Berdasarkan Hasil Uji Statistik t diketahui bahwa:

1. Berdasarkan analisis linear berganda, dapat dinyatakan bahwa Pajak Reklame berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dibuktikan dengan nilai t_{hitung} sebesar -1,013 dan nilai $t_{tabel} = 1,701$ ($t_{hitung} > t_{tabel}$) dengan nilai signifikansi $t_{hitung} = 0,320$ dan signifikansi $t_{tabel} = 0,05$ (Sig. $t_{hitung} > \text{Sig. } t_{tabel}$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak reklame tidak mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD). Hasil ini

membuktikan bahwa hipotesis H_1 ditolak. Pajak reklame tidak berpengaruh terhadap peningkatan PAD Kabupaten Purworejo. Hasil dalam penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Reny Rinawati (2013) bahwa pajak reklame memiliki hubungan yang kuat dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Berdasarkan analisis linear berganda, dapat dinyatakan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dibuktikan dengan nilai t_{hitung} sebesar 2,921 dan nilai $t_{tabel} =$

1,701 ($t_{hitung} > t_{tabel}$) dengan nilai signifikansi $t_{hitung} = 0,007$ dan signifikansi $t_{tabel} = 0,05$ (Sig. $t_{hitung} < \text{Sig. } t_{tabel}$). Dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah mempengaruhi pendapatan asli daerah. Hasil tersebut membuktikan bahwa hipotesis H_2 diterima. Penerimaan retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan PAD Kabupaten Purworejo. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Salah satu penelitian Md. Krisna Arta Anggar Kusuma dan NI Gst. Putu Wirawati (2013) yang menyatakan bahwa penerimaan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan melalui analisis regresi linear berganda pada Pemerintah Kabupaten Purworejo mengenai Pengaruh Pajak Reklame dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2016-2018, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan variabel Pajak Reklame tidak memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Purworejo. Hal ini terbukti dengan hasil Uji t Pajak Reklame diperoleh hasil signifikan sebesar 0,320 ($p = 0,320 > 0,05$). Hal ini disebabkan bahwa setiap peningkatan

Pendapatan Asli Daerah belum tentu dipengaruhi Pajak Reklame.

2. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Retribusi Daerah memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Purworejo. Hal ini terbukti dengan hasil Uji t Retribusi Daerah diperoleh hasil signifikan sebesar 0,007 ($p = 0,007 < 0,05$), yang berarti setiap peningkatan 1% dari Retribusi Daerah akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Berdasarkan hasil dari pengujian menunjukkan bahwa penerimaan retribusi daerah lebih dominan kontribusinya dalam peningkatan PAD Kabupaten Purworejo yakni sebesar 52,4% sedangkan pajak reklame hanya -18,2% kontribusinya terhadap PAD di Kabupaten Purworejo.

Saran

1. Melihat Pajak Reklame yang tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah perlu melakukan pengawasan rutin terhadap reklame yang tidak memiliki ijin ataupun yang sudah habis masa pajaknya, sehingga dapat ditangani dan diberikan sanksi yang tegas. Agar masyarakat sadar akan kewajiban membayar pajak yang seharusnya mereka lakukan. Selain itu harus melakukan pengawasan terhadap wajib pajak dari luar daerah yang belum mengetahui tentang aturan yang

harus dilakukan saat mengurus perizinan. Dengan melakukan sosialisai secara aktif mengenai pajak reklame kepada masyarakat agar mengerti pentingnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2. Selain itu melihat dari penerimaan Retribusi Daerah yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam perolehan Retribusi Daerah harus lebih ditingkatkan lagi, sehingga pemerintah tidak hanya berupaya meningkatkan Pajak Reklame tapi juga meningkatkan lagi Retribusi Daerah agar daerah memiliki pemasukan pendapatan yang maksimal, sehingga daerah dapat mandiri dalam pelaksanaan otonomi daerah.
3. Melihat dari hasil penelitian bahwa penerimaan retribusi daerah lebih dominan dari penerimaan pajak reklame, sebaiknya pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan peningkatan pajak reklame agar tidak terlalu jauh kontribusinya dari retribusi daerah melihat banyaknya reklame yang terdapat di Kabupaten Purworejo. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti tentang pengaruh pajak reklame dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah

disarankan untuk menambah sampel dan populasi serta pemilihan retribusi daerah yang lebih spesifik agar jelas retribusi jenis apa yang diteliti, selain itu menambahkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pendapatan asli daerah seperti berbagai jenis pajak daerah tidak hanya pajak reklame, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah.

Daftar Pustaka

- Adiati, Arum Kusumaningdyah, dkk. (2017). Analisis Pajak Reklame Di Kabupaten Purworejo Periode 2012-2016. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Bungin, Burhan. (2015). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Prenada Media Group: Jakarta.
- Darwin. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Mitra Wacana Media: Jakarta.
- Effendi, Rizal dan Ratna Juwita. (2013). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi.

- Jurusan Akuntansi. STIE MDP. Palembang.
- Ghozali, Imam. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Undip: Semarang.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. (2014). Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat: Jakarta.
- Kusuma, Md. Krisna Arta Anggar dan Ni Gst. Putu Wirawati (2013). Analisi Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/Kota di Provinsi Bali. Jurnal Akuntansi. Universitas Udayana. Bali.
- Latan, Hengky dan Selva Temalagi. (2013). Analisis Multivariate Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program IBM SPSS 20.0. Alfabeta: Bandung.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan edisi terbaru 2016. Andi: Jakarta.
- Peraturan Bupati Purworejo Nomor 71 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Rahayu,Esti. (2018). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Purworejo. Tugas Akhir. Politeknik Sawunggalih Aji Purworejo.
- Rinawati,Reny. (2012). Analisis Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. Jurnal Akuntansi. Universitas Negeri Surabaya. Surabaya.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta: Bandung.
- _____. (2013). Statistik Untuk Penelitian. Alfabeta: Bandung.

Triantoro, Arvian. (2010). Efektifitas Pemungutan Pajak Reklame dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung. Jurnal Ilmu Ekonomi. Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.